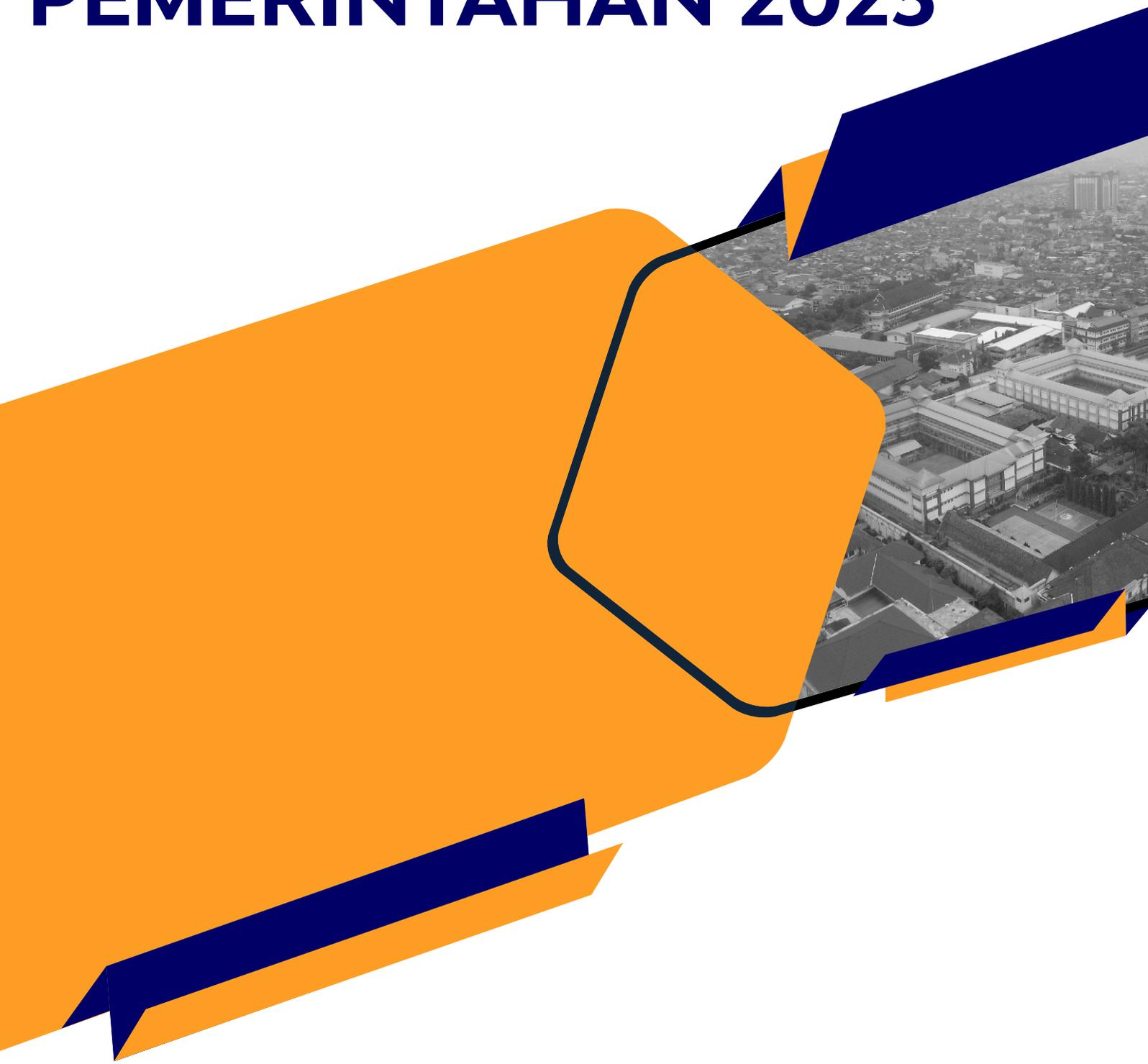


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN 2023



KATA PENGANTAR

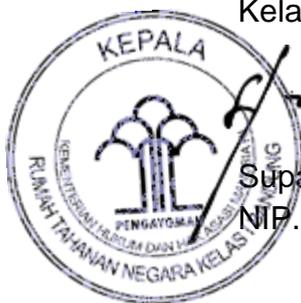
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT karena atas nikmat, rahmat, dan maghfirah-Nya laporan Ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir jaman, Aamiin.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2023 ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan deskripsi capaian kinerja yang diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya termasuk aspek keuangan. Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKJIP Tahun 2023 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon saran untuk penyempurnaan penyusunan LKJIP tahun anggaran yang akan datang.

Kepala,
Rumah Tahanan Negara
Kelas I Bandung



Suparman
NIP. 197506041999021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	Error! Bookmark not defined.
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
BAB II	11
PERENCANAAN KINERJA	11
A. PERENCANAAN STRATEGIS	11
B. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja	19
B. Realisasi Anggaran	21
C. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja	24
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	38
BAB IV	41
PENUTUP	41
A. KESIMPULAN	41
B. Saran	44

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menjalankan tugas dan fungsi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi-misi presiden dengan mengimplementasikan Tata Nilai PASTI dalam prosesnya.

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung memiliki 4 sasaran kegiatan dan 21 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari 21 indikator kinerja kegiatan tersebut didapatkan rata-rata target capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebesar 92.54 % dengan nilai capaian realisasi di sepanjang tahun 2023 dapat memenuhi target secara keseluruhan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai seluruh target yang telah ditetapkan, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung melakukan penyerapan anggaran pada tahun 2022 ini mencapai sebesar 99.56% dari Pagu Rp. 26.008.672.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 25,894,966,620,- Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran dimana pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Rumah Tahanan Kelas I Bandung mendapatkan nilai akhir 97,95 dan nilai pada aplikasi SMART sebesar 92,54 (sangat Baik). Dengan demikian Nilai Kinerja Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebesar 94,70. dimana nilai tersebut didapatkan dari perhitungan Nilai IKPA (bobot penilaian 40%) dan Nilai SMART (bobot penilaian 60%).

Merujuk pada capaian kinerja kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan instansi vertikal di kota/kabupaten yang menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya bidang Pemasarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat.

Dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain :

1. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
3. Memberikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Berdasarkan 8 (delapan) sasaran tersebut dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Rumah Tahanan Negara

Kelas I Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah unit pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Rutan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung memiliki tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rutan Kelas I Bandung memiliki fungsi :

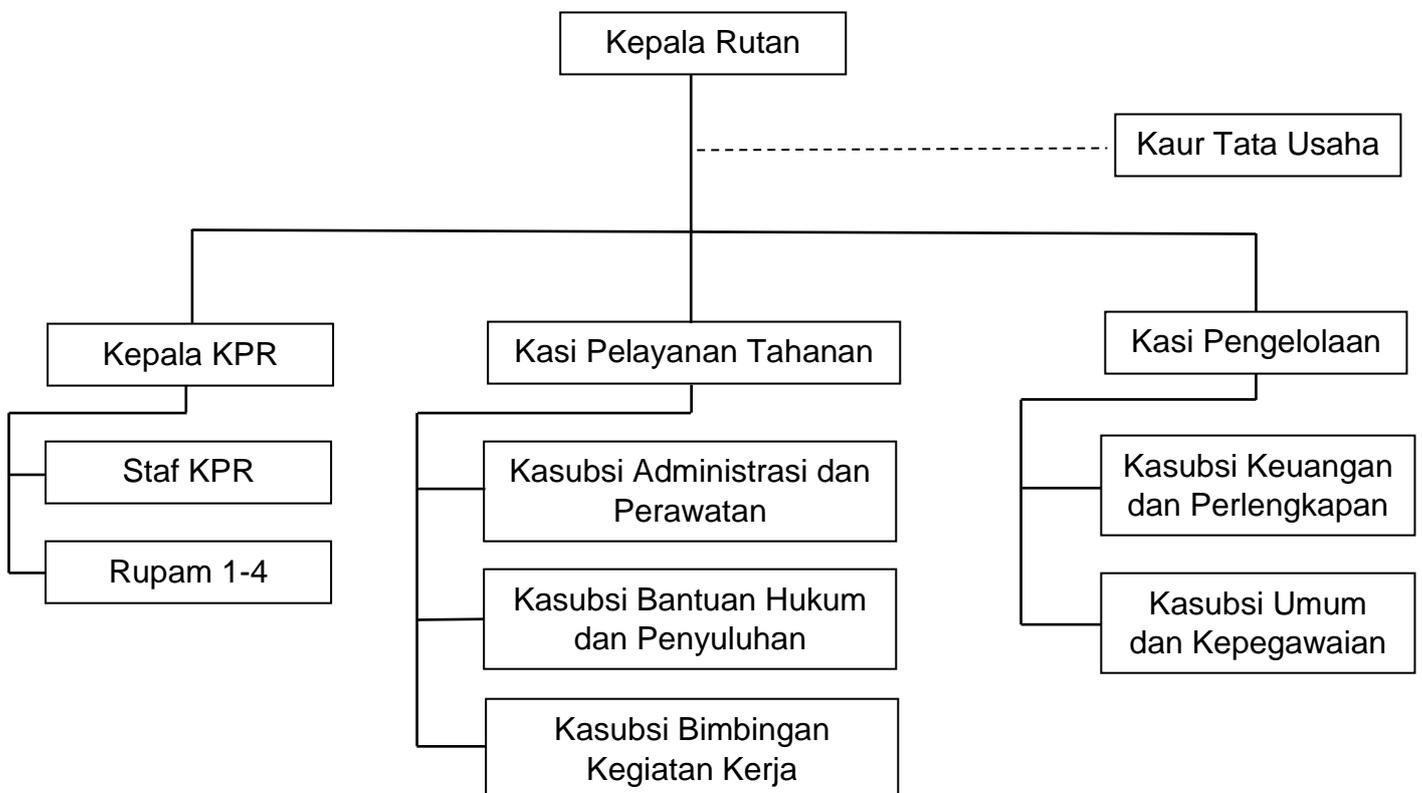
1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
3. Melakukan pengelolaan Rutan;
4. Melakukan tata usaha Rutan

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi tersebut, Rutan Kelas I Bandung memiliki Susunan Organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara;
2. Kepala Kesatuan Pengamanan;
3. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan;
4. Kepala Seksi Pengelolaan;
5. Kepala Urusan Tata Usaha;
6. Kepala Sub Seksi Umum;
7. Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan;
9. Kepala Sub Seksi dan Perawatan;
10. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja;

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari tiap-tiap seksi dalam organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengelolaan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.
2. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan tugas pelayanan tahanan yang berkaitan dengan administrasi dan perawatan, bantuan dan penyuluhan hukum, serta bimbingan kegiatan kerja.
3. Kepala Kesatuan Pengamanan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan tugas pengamanan dan ketertiban dengan melakukan pengaturan jadwal penjagaan, penggunaan peralatan pengamanan dan pembagian petugas jaga agar terciptanya suasana aman dan tertib dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.
4. Kepala Urusan Tata Usaha, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk melaksanakan sistem administrasi persuratan dan pengarsipan dalam bidang ketatausahaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan segala kegiatan di Rumah Tahanan Negara.



Berikut adalah Profil Pejabat Struktural Rutan Kelas I Bandung Tahun 2022 :

1. Nama : SUPARMAN, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP : 197506041999021001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
2. Nama : TRIAN PRATIKA, A.Md.P., S.H., M.H.
NIP : 199010242009121001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/c)
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
3. Nama : SURYA WIDJAYA, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP : 198911052009011001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Tahanan
4. Nama : INDRA GANJAR NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP : 198502192003121002
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan
5. Nama : BUDI SETIAWAN
NIP : 198403242009121007
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha
6. Nama : MUHAMMAD HARUN AL RASYID.
NIP : 199312092012121001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan
7. Nama : BOY NALDO, A.Md.P., S.H., M.M.
NIP : 198603182007031002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan
8. Nama : MUKHTAR, A.K.S
NIP : 196707121998031001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja
9. Nama : BUDI SANTIKA ASTRIADI, S.H.
NIP : 198003062005011001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan
10. Nama : Drs. DENI DASMANA, M.A.P.
NIP : 19670103 199603 1 002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Umum dan Kepegawaian

Rutan Kelas I Bandung didukung dengan jumlah SDM per 31 Desember 2023 sebanyak 161 orang, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	139	86,33
2	Perempuan	22	13,66
TOTAL		161 Orang	

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan			
		IV	III	II	I
1	S2	6	4	-	-
2	S1	-	50	-	-
3	D3	-	5	-	-
4	SMA	-	20	76	-
5	SMP	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menyusun Laporan Kinerja TA 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung;
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah instansi vertical Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Kota Bandung, Keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam menjalankan tugas fungsi Pemasyarakatan, Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung :

1. Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta bimbingan kegiatan bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isustrategis yang menjadi hamabatan dalam berkinerja adalah :

1. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya jumlah pegawai secara kuantitas yang tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada. Selain itu, masih belum optimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi, dimana dengan jabatan Petugas/Anggota Jaga yang ditempatkan di subseksi lain selama bertahun-tahun namun belum bisa berpindah menjadi Jabatan yang sesuai pada subseksi tersebut;

2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dalam rangka mempercepat proses kerja serta meningkatkan produktivitas bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih ada beberapa hal terkait sarana prasaran yang masih kurang memadai pada

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, seperti masih banyaknya pegawai yang menggunakan Alat Pengolah Data seperti Laptop non BMN alias kepemilikan pribadi karena kantor tidak memiliki jumlah prasarana yang cukup.

3. Anggaran

Dikarenakan tahun 2023 masih dalam masa pemulihan pasca pandemi covid-19 maka terdapat beberapa kegiatan yang sempat tertunda ataupun diundur pelaksanaannya sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap kalender kerja yang berpengaruh kepada disbursement plant (rencana penarikan dana/RPD).

F. Sistematika Pelaporan

- **Kata Pengantar**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Periode Tahun 2023.

- **Ringkasan Eksekutif**

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Periode Tahun 2023.

- **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

- **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan menyajikan terkait perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisi program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja.

- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

- **BAB IV Penutup**

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran/rekomendasi untuk kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa “Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

Visi :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;

3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Untuk memandu pencapaian Visi dan Misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia merupakan landasan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 – 2024 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan yang di dasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka dari itu, penetapan Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2020 – 2024 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Berikut Landasan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Misi Presiden, dan Sasaran RPJMN 2020-2024 :

**LANDASAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN 2020 – 2024**

MISI PRESIDEN	SASARAN RPJMN	MISI KEMENKUMHAM	SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM
Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya			

Pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai ketentuan perundang-undangan, menyusun rencana strategis (renstra) digunakan sebagai rencana lima tahun kedepan dalam mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan dan indicator pengukurnya.

➤ Visi

Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

➤ Misi

Melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia melalui proses pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

➤ Nilai dasar organisasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai kami "PASTI":

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

➤ Tujuan

1. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab; dan
2. Memberi jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

➤ Sasaran

1. Perawatan dan Pembinaan
 - a. Kualitas Ketakwaan Kepada Tuhan YME;
 - b. Kualitas Intelektual;
 - c. Kualitas sikap dan perilaku;
 - d. Kualitas profesionalisme dan keterampilan; dan
 - e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
2. Pelaksanaan
 - a. Isi lebih rendah dari kapasitas;
 - b. Menurunkan angka pelarian dan gangguan kamtib;
 - c. Meningkatkan secara bertahap jumlah Napi yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
 - d. Semakin menurunnya angka residivis;
 - e. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase yang ada di masyarakat;
 - f. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya;
 - g. Rutan dalam keadaan bersih dan terpelihara;
 - h. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara.

➤ Peta strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sasaran strategi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tertuang dalam sebuah gambar dan diagram ini dijadikan landasan arah kebijakan yang Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya serta kegiatan-kegiatan yang menunjang terwujudnya visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

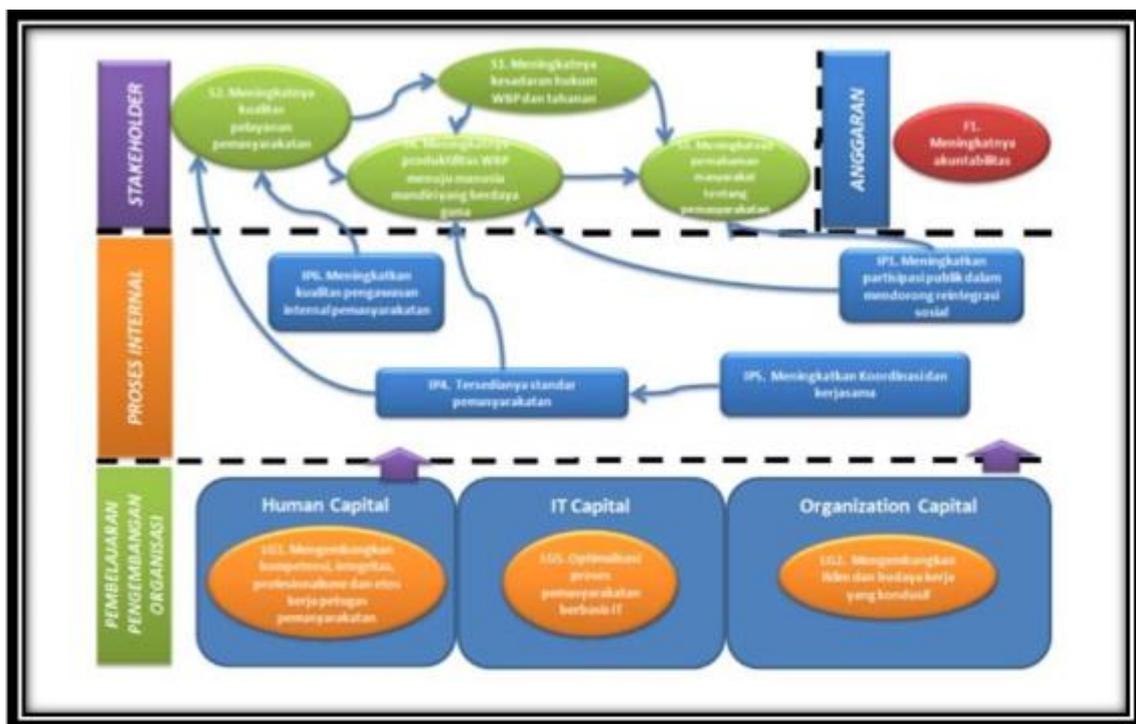


Diagram Peta Strategis Ditektorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam diagram diatas menunjukkan bahawa menegakan hukum dan hak asasi manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatah menjadi nomor utama, yang kedia adalah pengelolaan Pemasyarakatan yang menerapkan standar Pemasyarakatan berbasis IT, Ketiga meningkatkan Patisipasi masyarakat untuk terlibat, mendukung dan mengawasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan budaya kerja petugas yang bersih dan bermartabat,

➤ Arah Kebijakan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan

misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditempuh Rutan Kelas I Bandung sesuai dengan arah kebijakan dari Dirjen PAS yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Setelah Rutan Kelas I Bandung mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara maka Rutan Kelas I Bandung sesuai arahan dari Dirjen Pemasarakatan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan meningkatkan seluruh komponen penunjang dalam meraih predikat WBBM;
- b. Penjamin standar pelayanan pemsarakatan dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan pemsarakatan;
- c. Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis;
- d. Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, sop layanan, dan standar layanan;
- e. Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebarluasan informasi yang akurat.

➤ Perintah Harian

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS I BANDUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supaman
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2 Januari 2023




Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
 R. Andika Dwi Prasetya
 NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
 Supaman
 NIP. 197506041999021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS I BANDUNG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Rut berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	Indeks keamanan dan keterlibatan UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kejasama Pemasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	85 85 85 83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan terib	Indeks Keamanan dan Keterlibatan UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan /Tahanan/Anak Narapidana/ Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana/Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar 80% 2. Persentase Tahanan Anaspidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan preventif secara berkualitas 94% 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (bu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 97% 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 80% 5. Persentase tahanan/narapidana lama yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 85% 6. Persentase tahanan/narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 85% 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (diikuti jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 80%	80% 94% 97% 80% 85% 85% 80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunya tahanan yang overstay 90% 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 90% 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum 90%	90% 90% 90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keterlibatan di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengujian yang dilakukan sesuai standar 85% 2. Persentase gangguan kambo yang dapat dicegah 80% 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak polaku gangguan kambo 85% 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kambo secara buntas 80%	85% 80% 85% 80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Saker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat tepat waktu 1 Layanan 2. Tersusunnya dokumen pengendalian BKM dan Kerumah tanggapan 1 Layanan 3. Terseruhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	1 Layanan
5. Jumlah Layanan Perencanaan	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 12.627.534.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 12.627.534.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.354.988.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 14.354.988.000,-

Bandung, 2 Januari 2023




Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
 R. Andika Dwi Prasetya
 NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
 Supaman
 NIP. 197506041999021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS I BANDUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supaman
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 2 Januari 2023



Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
 Supaman
 NIP. 197506041999021001

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, kriteria keberhasilan ini berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, maka diperoleh data capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan perincian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	100%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan	94%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rehabilitasi Narkotika di wilayah	layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas			
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	100%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	100%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	100%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai	1 Layanan	1 Layanan	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	pemasyarakatan			
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

B. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran ini diisi dengan pagu alokasi Unit Pelaksana Teknis yang terdapat dalam RKA-KL pada tahun anggaran. Menjelaskan anggaran pada tiap akun yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kementerian Negara/Lembaga	: 013	Kementerian Hukum dan HAM RI
Eselon I	: 05	Ditjen Pemasyarakatan
Wilayah/Provinsi	: 0200	BA(013) ES1(05) Jawa Barat
Satuan Kerja	: 526801	Rumah Tahanan Negara Bandung
Jenis Satuan Kerja	: KD	Kantor Daerah



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 ESELON I : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
 WILAYAH/PROVINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 526801 RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG
 JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/01/24 12:53 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI BELANJA			8-3/4	9-4.7
				5	6	7-5-6		
		ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
51	BELANJA PEGAWAI				0			
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7,993,981,000	7,104,857,000	7,129,492,640	513,640	7,129,978,794	89.23	55,076,206
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	112,000	116,000	112,090	504	111,596	94.99	6,414
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	504,350,000	502,162,000	496,753,670	0	496,753,670	98.52	5,406,330
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155,414,000	137,075,000	134,245,926	0	134,245,926	97.94	2,029,074
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	64,540,000	67,440,000	66,370,000	0	66,370,000	98.41	1,070,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	609,504,000	575,610,000	572,805,000	0	572,805,000	99.51	2,805,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,310,000	10,010,000	9,414,470	0	9,414,470	94.05	595,530
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	445,093,000	425,882,000	424,815,720	0	424,815,720	99.75	1,066,280
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,751,616,000	1,021,616,000	1,001,302,000	0	1,001,302,000	90.75	20,254,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,520,000	4,070,000	4,210,000	0	4,210,000	90.15	460,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	11,529,440,000	10,529,440,000	10,439,581,516	514,330	10,439,607,166	99.15	90,372,834
5122	Belanja Lembur	46,623,000	46,623,000	46,570,000	0	46,570,000	99.89	53,000
512211	Belanja Uang Lembur	46,623,000	46,623,000	46,570,000	0	46,570,000	99.89	53,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	46,623,000	46,623,000	46,570,000	0	46,570,000	99.89	53,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	11,576,063,000	10,576,063,000	10,486,151,516	514,330	10,485,637,166	99.15	90,425,834
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	177,600,000	164,350,000	164,122,699	0	164,122,699	99.86	227,101
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,012,780,000	11,069,560,000	11,069,560,000	0	11,069,560,000	100	0
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	136,075,000	136,075,000	136,053,600	0	136,053,600	99.96	21,200
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	153,840,000	153,840,000	153,840,000	0	153,840,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	11,465,695,000	11,529,425,000	11,529,176,699	0	11,529,176,699	100	248,301
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	11,465,695,000	11,529,425,000	11,529,176,699	0	11,529,176,699	100	248,301
5212	Belanja Barang Non Operasional	350,024,000	431,449,000	431,156,296	0	431,156,296	99.93	290,702
521211	Belanja Bahan	155,400,000	97,214,000	97,162,089	0	97,162,089	99.95	51,911
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	506,024,000	528,663,000	528,320,387	0	528,320,387	99.94	342,613
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	506,024,000	528,663,000	528,320,387	0	528,320,387	99.94	342,613
5216	Belanja Barang Persediaan	1,051,110,000	1,241,850,000	1,241,117,626	0	1,241,117,626	99.94	762,372
521611	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	205,620,000	107,695,000	107,457,201	0	107,457,201	99.76	237,799
521641	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,336,730,000	1,348,575,000	1,348,574,829	0	1,348,574,829	99.93	1,000,171
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5216	1,336,730,000	1,348,575,000	1,348,574,829	0	1,348,574,829	99.93	1,000,171
5221	Belanja Jasa							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 526801 **RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/01/24 12:53 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_aku_satker
Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	BELANJA		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=3/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	1,104,000,000	1,071,100,000	1,061,791,154	0	1,061,791,154	99.13	9,300,646
522112	Belanja Langganan Telepon	1,000,000	1,100,000	1,056,664	0	1,056,664	96.06	43,336
522113	Belanja Langganan Air	72,000,000	74,470,000	64,107,600	0	64,107,600	86.09	10,362,400
522151	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	1,656,000	1,500,000	0	1,500,000	90.56	156,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	42,000,000	160,000	0	0	0	0	160,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,224,000,000	1,178,486,000	1,158,455,418	0	1,158,455,418	98.3	20,030,582
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	560,216,000	560,216,000	560,204,506	0	560,204,506	100	13,492
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	72,000,000	87,000,000	86,950,000	0	86,950,000	99.94	50,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152,347,000	162,197,000	162,035,313	0	162,035,313	99.9	161,667
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,295,000	1,295,000	1,270,000	0	1,270,000	96.07	25,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	605,660,000	830,710,000	830,459,821	0	830,459,821	99.97	250,179
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	9,000,000	5,250,000	4,690,000	0	4,690,000	93.14	360,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,950,000	10,500,000	9,452,300	0	9,452,300	90.02	1,047,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	46,950,000	15,750,000	14,342,300	0	14,342,300	91.06	1,407,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	15,406,259,000	15,432,609,000	15,409,329,454	0	15,409,329,454	99.85	23,279,646
	JUMLAH BELANJA	26,962,322,000	26,008,672,000	25,895,480,970	514,350	25,894,966,620	99.56	113,705,380

C. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran kami sampaikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	100%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	100%

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari sasaran kegiatan tersebut adalah dengan cara menghitung persentase layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil

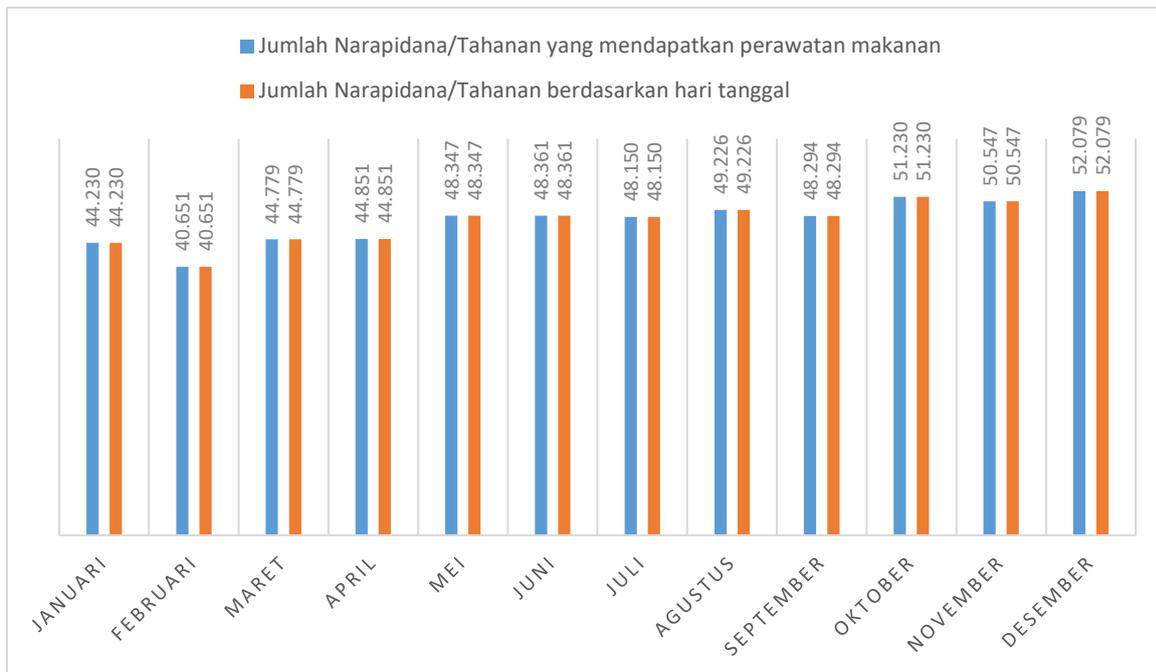
penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar;
- b. Persentase tahanan/narapidana yang mendapatkan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi;
- c. Persentase tahanan / narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis;

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar.



Berdasarkan data di atas, jumlah total narapidana dan tahanan selama tahun 2023 berdasarkan hari tanggal adalah 570.745 orang dan jumlah narapidana dan tahanan yang mendapatkan makanan sebanyak 570.745 orang. Dengan data tersebut Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pemenuhan pemberian makan kepada tahanan / narapidana selama Tahun 2023 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar sebesar 100%.

b. Capaian Sub Indikator : Persentase tahanan dan narapidana yang mendapatkan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi.

Jenis Perlengkapan	Volume	Jumlah Pemenuhan	(%)	Keterangan
Pakaian narapidana/ tahanan	1.532 x 4 Stel	6.128	100 %	Volume barang sesuai dengan DIPA TA 2023
Perlengkapan Makan/Minum	1.532	1.532	100 %	
Perlengkapan Mandi	1.532	1.532	100 %	
TOTAL PEMENUHAN			100 %	

Berdasarkan data tersebut diatas, Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi selama Tahun 2023 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi sebesar 100 %.

c. Capaian Sub Indikator : Persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis.

Jenis penyakit yang dialami WBP selama tahun 2023

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
1	Abses	322	322
2	Anemia	49	49
3	Asthma Bronciale	72	72
4	Candidiasis	26	26
5	Caries Dentis	134	134
6	Cephalgia	96	96
7	Common Cold	162	162
8	Conjungtivitis	21	21
9	Cought	22	22

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
10	DKA	342	342
11	DM	26	26
12	Dysmenorhea	36	36
13	Dyspepsia	134	134
14	Gastritis	52	52
15	Gastro Enteritis	234	234
16	Ginggivitis	25	25
17	Haemorhoid	19	19
18	Hematemesis	6	6
19	Hepes Zooster	22	22
20	Hernia	3	3
21	Hordeolum	12	12
22	Hipertensi	463	463
23	Insect Bite	0	0
24	ISPA	356	356
25	ISK (infeksi saluran kemih)	12	12
26	Katarak OD	2	2
27	Konstipasi	63	63
28	Kolik Abdomen	9	9
29	Lypoma	4	4
30	Myalgia	23	23
31	Malaise	7	7
32	Neuropati	0	0
33	OA	24	24
34	OE	15	15
35	OMA	10	10
36	Obs Febris	143	143
37	Osteomyelitis	1	1
38	Pharingitis	395	395
39	Post Trauma	9	9
40	Scabies	402	402
41	Stomatitis	25	25
42	Susp BPH	1	1
43	Susp HNP	5	5
44	Susp OA	12	12
45	Susp TB	21	21
46	TB Paru	17	17
47	Tinea	1	1
48	Thypoid	2	2
49	Tonsilitis	36	36
50	Tinitus	7	7
51	Urtikaria	32	32
52	Varicela	0	0
53	Vertigo	12	12

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
54	Vulnus Excoriasi	2	2
55	Vulnus Laceratum	2	2
TOTAL		3.928	3.928

Jenis perawatan WBP

Bulan	Rawat Inap Dalam Rutan	Rawat Inap Luar Rutan	Rawat Jalan
Januari	3	0	369
Februari	3	2	375
Maret	1	0	310
April	0	1	289
Mei	0	0	326
Juni	0	1	337
Juli	3	0	350
Agustus	2	2	256
September	0	0	362
Oktober	0	0	244
November	0	1	368
Desember	2	0	342
TOTAL	14	7	

Berdasarkan data tersebut di atas, Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan penanganan medis bagi tahanan / narapidana yang sakit selama Tahun 2023 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian indikator persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis adalah sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	100%

Tabel 6. Indikator 1 Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan ini memiliki tiga indikator kinerja, untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut kita harus menghitung presentase Kualitas Pelayanan Tahanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian indikator sebagai berikut:

- a. Persentase tahanan Overstaying;
- b. Persentase tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum; dan
- c. Persentase tahanan yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum.

Berdasarkan data yang ada di Sistem database pemasyarakatan (SDP) jumlah WBP di Rutan Kelas I Bandung dapat digambarkan melalui grafik berikut :



- a. Capaian Indikator Kinerja: Persentase Tahanan Overstaying atau mengalami kelebihan masa tahanan selama tahun 2023 sesuai dengan data yang diambil dari SDP adalah sebanyak 0 WBP atau dengan kata lain 100% tidak ada tahanan Overstay di Rutan Kelas I Bandung sepanjang tahun 2023.

Adapun Indikator Persentase Tahanan Overstaying dapat diperkuat dengan data kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dimana pada tahun 2023 Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	USULAN		DISETUJUI		JUMLAH
	PB	CB	PB	CB	
Januari	39	36	39	36	75
Februari	35	31	35	31	66
Maret	32	23	32	23	55
April	24	29	24	29	53
Mei	24	35	24	35	59
Juni	48	38	48	38	86
Juli	38	29	38	29	67
Agustus	23	21	23	21	44
September	22	33	22	33	55
Oktober	37	43	37	43	80
November	44	30	44	30	74
Desember	20	21	20	21	41
TOTAL	386	369	386	369	755

Selain data tersebut Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan Mutasi Narapidana/Tahanan selama Tahun 2023 untuk memenuhi indikator kinerja Persentase tahanan Overstaying sesuai standar, adapun data Mutasi Narapidana/Tahanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

BULAN	TUJUAN MUTASI	JUMLAH
Januari	LAPAS KELAS II B TASIKMALAYA	1
Februari	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	25
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
Maret	LAPAS KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG	5
April	LAPAS KELAS II B CIANJUR	1
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
Mei	LAPAS KELAS I CIPINANG	1
Juni	NIHIL	
Juli	NIHIL	
Agustus	LAPAS KELAS I SUKAMISIN	15
	LAPAS KELAS II B BANJAR	25
	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	25

BULAN	TUJUAN MUTASI	JUMLAH
September	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
	LAPAS KHUSUS KELAS II A KARANG ANYAR	2
Oktober	LAPAS KELAS II A SUBANG	35
November	LAPAS KELAS I NUSAKAMBANGAN	1
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	10
Desember	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	30
	LAPAS KELAS II A SUBANG	1
TOTAL		252

Melalui ketiga sumber data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan Overstaying mendapatkan nilai sebesar 100%.

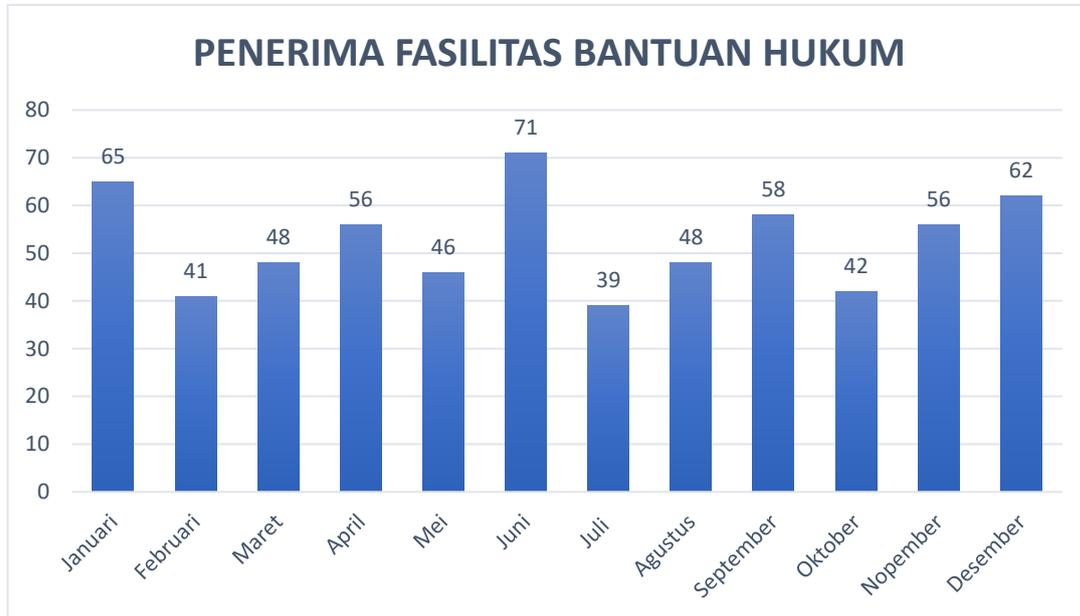
- b. Capaian Indikator Kinerja: Persentase tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

BULAN	JUMLAH WBP	PESERTA PENYULUHAN	(%)
Januari	1.421	928	65,3
Februari	1.449	1.052	72,6
Maret	1.454	1.012	69,6
April	1.557	1.179	75,7
Mei	1.590	1.169	73,5
Juni	1.612	1.067	66,2
Juli	1.582	1.156	73,1
Agustus	1.614	1.188	73,6
September	1.618	1.120	69,2
Oktober	1.656	1.240	74,9
Nopember	1.691	1.216	71,9
Desember	1.680	1.100	65,5
TOTAL			70,9

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Persentase tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum adalah 70,2% dari total WBP yang ada di Rutan Kelas I Bandung, dengan demikian ketercapaian indikator kinerja

Persentase tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum mendapatkan nilai sebesar 100%.

- c. Capaian Indikator Kinerja: Persentase tahanan yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :



Grafik diatas menyampaikan bahwa seluruh bahwa Narapidana/Tahanan yang membutuhkan Fasilitas Bantuan Hukum telah mendapatkan layanan yang sesuai dengan standar, dengan demikian ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum mendapatkan nilai sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 3

Peningkatan Kualitas Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	100%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	100%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	100%

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase layanan keamanan dan ketertiban sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar;
- b. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar.

Untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai. Langkah- langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahan tersebut adalah dengan memeriksa pegawai, tamu juga pengunjung yang masuk ke area portir beserta barang bawaan yang dibawa. Hal ini dilakukan untuk menyaring barang – barang terlarang yang masuk ke dalam. Pada proses ini dilakukan oleh anggota Petugas Pengamanan Pintu Utama yang dibantu piket dari masing – masing seksi. Selain itu dilaksanakan pula pengeledahan terhadap kamar – kamar hunian WBP secara acak dan insidental. Bagi petugas regu pengamanan dan piket, pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban juga dapat dilakukan dengan cara kontrol di sekitar blok hunian.

Data Giat Razia dalam Rutan Tahun 2023

Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Temuan	Tindak Lanjut
Januari	6	Instalasi Listrik	Dicatat dan Dimusnahkan
Februari	4	- Handphone - Earphone - Charger - Botol Kaca - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan

Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Temuan	Tindak Lanjut
Maret	3	- Handphone - Earphone - Charger - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan
April	4	- Handphone - Headshet - Power bank - Garpu/ Sendok - Gunting - Sendok Stainless	Dicatat dan Dimusnahkan
Mei	3	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel –kabel - Charger Handphone - Sikim - Kipas	Dicatat dan Dimusnahkan
Juni	6	- Handphone - Earphone - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
Juli	3	- Handphone - Earphone - Charger - Botol Kaca - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan
Agustus	2	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
September	3	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel –kabel - Charger Handphone - Sendok Stainless	Dicatat dan Dimusnahkan
Oktober	4	- Handphone - Earphone - charger - Kabel –kabel charger	Dicatat dan Dimusnahkan
November	2	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
Desember	5	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2023, kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban selalu dilakukan sebanyak kegiatan dengan melaksanakan pengeledahan baik secara rutin maupun insidental. Dengan demikian Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar selama Tahun 2023 untuk memenuhi indikator kinerja layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar sebesar 100%

b. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan tindak lanjut gangguan keamanan dan ketertiban yang telah dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa pidananya di Rutan Kelas I Bandung.

Data Pelanggaran Tata Tertib Tahun 2023

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah yang ditindaklanjuti
Pemberontakan	0	0
Penyelundupan/ Penggunaan Narkoba	3	3
Percobaan Pelarian	0	0
Penganiayaan / Kekerasan/ Perkelahian	6	6
Kepemilikan Handphone	19	19
Hutang Piutang	26	26
JUMLAH	59	59

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran tata tertib di Rutan Kelas I Bandung yang dilakukan oleh WBP selama tahun 2023 sebanyak 59 (lima puluh sembilan), dan seluruh pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan membuat berita acara dan sanksi kepada pelanggarnya. Dengan demikian gangguan keamanan yang terjadi selalu ditindak dan ditanggulangi sesuai standar. Hal ini menandakan Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan

penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan sesuai standar selama Tahun 2023 untuk memenuhi indikator kinerja layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase gangguan keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya pelayanan Tahanan di dalam Rutan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Unit	1 Unit	100%

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung jumlah layanan perkantoran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan perkantoran sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan kantor

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Capaian Sub Indikator : Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian Persentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

Dalam pelayanan pembayaran Gaji dan Tunjangan para pegawai Rutan Kelas I Bandung dapat dilihat pada diagram berikut :

Data Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan hingga Desember 2023

No	Jenis Pembayaran		Jumlah
1	Gaji Pokok PNS	Rp.	7.129.492.640
2	Pembulatan Gaji PNS	Rp.	112.090
3	Tunjangan Suami / Isteri	Rp.	496.753.670
4	Tunjangan Anak	Rp.	134.245.926
5	Tunjangan Struktural	Rp.	66.370.000
6	Tunjangan Fungsional	Rp.	572.805.000
7	Tunjangan Beras	Rp.	424.815.720
8	Uang Makan	Rp.	1.601.362.000
9	Tunjangan PPh	Rp.	9.414.470
10	Tunjangan Umum	Rp.	4.210.000

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hingga bulan Desember tahun 2023 ada sembilan jenis pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai Rutan Kelas I Bandung, dan semua kegiatan tersebut berjalan dengan baik sampai dengan akhir tahun, jadi persentasenya sebesar 100%. Dengan demikian pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulannya dan memenuhi indikator kinerja layanan perkantoran sesuai standar.

- b. Capaian Sub Indikator : Persentase operasional dan pemeliharaan kantor

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian Persentase Belanja operasional pemeliharaan kantor pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung selama tahun 2023.

Dalam pelayanan operasional pemeliharaan kantor pada Rutan Kelas I Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Kesehatan Pegawai	4.350.000	4.339.189	10.811
2	Pemeliharaan Gedung	667.218.000	667.154.508	63.492
3	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	94.642.000	94.464.432	177.568
4	Pemeliharaan Kendaraan	68.850.000	68.840.881	9.119
5	Langganan Daya dan Jasa	1.169.270.000	1.149.488.076	19.781.924
6	Jasa Pos	4.800.000	4.800.000	0
7	Keperluan perkantoran	213.750.000	213.376.176	373.824
8	Konsultasi dan Koordinasi	1.350.000	1.290.000	60.000
9	Jamuan Tamu	40.450.000	40.436.134	13.866
10	Honor Operasional Satuan Kerja	153.840.000	153.840.000	0
11	Penambah Daya Tahan Tubuh	136.875.000	136.853.800	21.200
12	Penanganan dan Pencegahan Covid-19	3.100.000	3.000.000	100.000
TOTAL		2.558.495.000	2.537.883.196	20.611.804

Uraian kegiatan pada tabel di atas menerangkan bahwa selama 12 bulan, 12 (dua belas) kegiatan sudah terealisasi dengan baik atau 99% dari anggaran yang tersedia untuk operasional dan pemeliharaan kantor sudah terserap selama tahun 2023. Dengan demikian sub indikator operasional dan pemeliharaan kantor telah dilakukan setiap bulannya dan memenuhi indikator kinerja layanan perkantoran sesuai standar.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada satuan kerja disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel dibawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan:

Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran	
		Pagu (Rp)	Total realisasi (Rp)
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Tahanan	107.900.000	107.448.945
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	12.558.214.000	12.557.617.503
Operasi Bidang Keamanan	Layanan Keamanan dan Ketertiban	18.000.000	17.850.960
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Dukungan Manajemen Satker	190.000.000	188.528.850
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	13.134.558.000	13.024.034.712
Total		26.008.672.000	25.895.480.970

2. Analisis Rasio Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan di satuan kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terkait dengan kegiatan realisasi program perlu ditetapkan standar atau acuan untuk lebih kegiatan yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Pengukuran kinerja keuangan secara umum mencakup 3 (tiga) bidang yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, meliputi:

- 1) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan;
- 2) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan kepada masyarakat dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya biaya tersebut meningkat;

- 3) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan, belanja dan proyeksi tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung pada tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara garis besar capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	100%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	100%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif	80%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	(berhasil sembuh)			
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	100%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	100%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	100%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Dari hasil capaian tersebut, maka Target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebesar 82 % dengan realisasi sebesar 100 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung tahun 2023 telah memenuhi target. Capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung berdasarkan hasil penghitungan di atas sudah termasuk kategori Baik

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang terlibat dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan stakeholder. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat, secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana layanan dan minimnya pemahaman petugas atas budaya pelayanan serta SOP mengenai pelayanan kunjungan yang kurang efektif dan efisien;
2. Tidak adanya pembinaan lanjutan bagi narapidana yang sudah bebas serta hasil pembinaan yang tidak maksimal;
3. Kurangnya tenaga medis pelaksana rehabilitasi serta tidak adanya anggaran untuk program rehabilitasi;
4. Minimnya anggaran sarana dan prasarana pembinaan keterampilan, minimnya kualitas dan kuantitas SDM yang melakukan program pembinaan, serta minimnya minat narapidana untuk mengikuti pembinaan kemandirian;
5. Tidak adanya tenaga infrastruktur tetap, sulitnya pemasaran untuk hasil karya narapidana, serta minimnya anggaran untuk pembinaan keterampilan kerja;
6. Pelayanan administrasi tergantung dengan internet, kurang pahamnya petugas tentang mekanisme dokumen laporan, dan keterlambatan administrasi dari penengah hukum lainnya;
7. Belum optimalnya SDP integrasi, terlambatnya litmas dari bapas, serta kurangnya kelengkapan administrasi pengusulan integrasi;
8. Minimnya ketaatan petugas untuk melaksanakan SOP serta sulitnya mengendalikan peredaran HP dan narkoba;
9. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban serta tidak jeranya narapidana yang diambil tindakan atas pelanggaran; dan
10. Rendahnya budaya kerja, penguasaan teknologi, minimnya monitoring pelaksanaan tugas layanan internal perkantoran.

B. Saran

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan teknis pemasyarakatan;
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

#RUTAN1BANDUNG